

## **BAB 3**

### **INTERVENSI MILITER INTERNASIONAL TERHADAP DA'ESH (ISIS)**

Karena tulisan membahas salah satunya mengenai dampak dari serangan intervensi militer internasional terhadap ISIS maka tentu saja harus adanya penjelasan mengenai tentang intervensi militer internasional itu sendiri yang dimana menyangkut respon internasional dari dua kubu yaitu koalisi yang dipimpin Amerika Serikat dan Koalisi RSII –Rusia Suriah, Iraq, dan Iran ditambah dengan Hezbollah–.

Tulisan ini akan mengupas Koalisi tersebut dari latar belakang dan kepentingannya dalam pertarungan melawan ISIS, Serta legalitas nya atas intervensi militernya di kedua negara menjadi korban dari kekerasan ISIL di timur tengah yaitu Suriah dan Iraq. Serta ditambah dengan kasualitas dan hasil yang didapatkan dalam pertempuran melawan ISIL di kedua negara tersebut.

#### **A. RESPON AWAL DUNIA INTERNASIONAL ATAS TERORISME**

Intervensi militer internasional merupakan upaya bagi dunia internasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan kekuatan militer sebagai alatnya. Dalam hal ini permasalahan yang ingin dibawa adalah adalah kasus mengenai muncul dan berkembangnya terorisme yang meresahkan masyarakat internasional. Intervensi ini tentu saja pertama kali hadir sebagai respon dari kekerasan terorisme yang hadir sebagai ancaman dunia internasional yaitu ketika terjadinya kasus 11 September 2001, yang dimana menyerang bangunan-bangunan penting Amerika Serikat seperti gedung gedung WTC dan Pentagon serta menewaskan 2,977 di New York City Washington dan daerah Shanksville di

Pennsylvania.<sup>144</sup> Sehingga George W Bush sebagai Presiden Amerika mengeluarkan metafor *War on Terror* dengan pernyataannya di *joint session of Congress* yaitu:

*Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.*<sup>145</sup>

*War on Terror* ini merupakan langkah kongkrit untuk melakukan intervensi militer terhadap jaringan teror di dunia, yang dimana pada masa itu tertuju pada Al-Qaeda yang diduga sebagai satu satunya oknum pelaku atas kasus 11 September tersebut. Pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai tanda bahwa Amerika Serikat yang sewaktu itu dipimpin oleh Bush akan melakukan tindakan militer untuk memberantas jaringan teror global sebagai musuh bersama. Yang pada akhirnya seperti yang dikatakan sebelumnya Amerika Serikat membangun koalisi dengan keterlibatan negara anggota NATO yang menggunakan Pasal 5 –yaitu *collective defense* dimana setiap member harus melindungi satu sama lain–. Yang berarti sembilan negara lain yang tergabung dalam aliansi NATO harus ikut campur dalam *war of terror* yang dicanangkan oleh Amerika Serikat untuk melawan organisasi teroris yang dalam kasus ini ialah Al-Qaeda di Iraq. Hal ini juga didukung dengan resolusi 1368 Dewan Keamanan PBB yang dalam isinya menyatakan “*Determined to combat by all means threats to international peace and security caused by terrorist acts*” yang berarti resolusi ini telah melegalkan

---

<sup>144</sup> CNN Library. (2013, July 27). *September 11 Fast Facts*. Retrieved from: <https://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-fast-facts/index.html>

<sup>145</sup> The White House . (2001, September 20). *Address to a Joint Session of Congress and the American People*. Retrieved from : <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>

segala bentuk kekuatan militer untuk melawan gerakan teroris tersebut.<sup>146</sup>

Walaupun begitu Koffi Annan sebagai Sekertaris Jenderal PBB memperingatkan untuk tidak bersikap gegabah, karena hal itu akan menyulitkan Dewan Keamanan, selain itu juga perang terhadap Iraq harus ditunjukkan dengan alasan yang layak dan kredibel.<sup>147</sup> Namun di tahun 2004 sikap gegabah Amerika Serikat yang menginvasi Iraq dengan sangat masif tersebut justru membuat Kofi Annan menyatakan bahwa serangan AS maupun koalisinya yang bertubi-tubi tersebut illegal dan bertentangan dengan Piagam PBB.<sup>148</sup>

Perang melawan Al-Qaeda berlangsung intens sejak dikeluarkan pernyataan war on terror dari pemerintah Amerika Serikat yaitu pada akhir september 2001 dengan menjadikan Afghanistan dan Iraq yang dimana kedua wilayah tersebut diyakini sebagai markas daripada gerakan teror seperti Al-Qaeda dan Taliban sebagai target serangan Amerika Serikat serta aliannya. Diketahui juga bahwa Afghanistan telah dikuasai secara keseluruhan di awal September 2001 –sebelum kasus 9/11– oleh kelompok Taliban yang bersekongkol dengan Al-Qaeda, hal ini ditandai dengan terbunuhnya pimpinan koalisi anti-taliban atau dikenal juga sebagai aliansi utara – Ahmad Shah Massoud–, sehingga memudahkan kelompok

---

<sup>146</sup> Bergen, P. L. (2011). *The Longest War: The Enduring Conflict Between America and Al-Qaeda*. New York : A Division of Simon & Schuster, Inc.

<sup>147</sup> Burkeman, O. (2002, November 15). Annan warns Bush against impatience. Retrieved from *The Guardian*:

<https://www.theguardian.com/world/2002/nov/15/iraq.usa>

<sup>148</sup> BBC . (2004, September 16). Iraq War Illegal, Says Annan.

Retrieved from *BBC News*:

[http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle\\_east/3661134.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3661134.stm)

tersebut untuk memperoleh kekuasaan secara penuh di Afghanistan.<sup>149</sup>

Pada Dasarnya perang di Iraq baru dimulai dua tahun setelahnya yaitu pada 20 Maret 2003, yaitu ketika Saddam Hussein menolak untuk pergi meninggalkan Iraq. Hal itu dimulai ketika *aircraft* milik Amerika Serikat menjatuhkan bom secara presisi di kompleks bunker yang dimana Presiden Iraq Saddam Hussein dipercaya sedang melakukan pertemuan dengan staf senior. Hal ini selanjutnya diikuti dengan runtutan serangan udara yang ditujukan kepada pemerintah dan instalasi militer di Iraq, dan dalam beberapa hari militer Amerika Serikat telah menginvasi Iraq dari Kuwait ke selatan. Perang ini dimulai karena pada tahun 2002 Saddam Hussein sebagai Presiden Iraq dituduh sebagai subjek yang tetap melanjutkan kepemilikan dan pembuatan senjata pemusnah massal –walaupun pada akhirnya tuduhan tersebut terbukti salah– yang membuat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1441, yang meminta Iraq untuk diinspeksi secara lebih lanjut, pemerintah Iraq sendiri sebenarnya menuruti resolusi tersebut. Namun pada awal 2003, Presiden Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menuduh bahwa Iraq melanjutkan untuk menghalangi Inspeksi PBB dan tetap mempertahankan senjata terlarang. Karena hal tersebut President Bush menghentikan segala diplomasi kepada pemerintah Iraq dan memberikan ultimatum kepada Saddam selama 48 jam untuk meninggalkan Iraq.<sup>150</sup>

Kekerasan yang berlanjut tersebut telah menghadirkan al-Qaeda di Iraq yang muncul pertama kali pada tahun 2004 yaitu ketika Abu Mus'ab al-Zarqawi –yang juga menjadi founding father ISIS akan dijelaskan di Bab selanjutnya–

---

<sup>149</sup> Bergen, P. L. (2011). *The Longest War: The Enduring Conflict Between America and Al-Qaeda*. New York : A Division of Simon & Schuster, Inc. Hal. 27

<sup>150</sup> Britannica. (2011). *Iraq War ;2003-2011*. Retrieved from: <https://www.britannica.com/event/Iraq-War>

seorang militan kelahiran Jordania telah memimpin pemberontakan di Iraq, dan membentuk aliansi dengan al-Qaeda serta menyatakan janji setia kelompoknya kepada Osama bin Laden sehingga mengizinkan dirinya sebagai pemimpin al-Qaeda cabang Iraq. Al-Zarqawi yang dipandang sebagai salah satu militan yang paling destruktif di Iraq yang telah mengorganisir gelombang serangan, bom bunuh diri, mentarget pasukan keamanan dan masyarakat sipil dll, dan berniat untuk memperdalam konflik sektarian di Iraq. sampai dengan tahun 2006 Al-Zarqawi dinyatakan tewas tetapi Al-Qaeda tetap aktif walaupun pemimpinya tersebut tewas. Dan di tahun 2007 organisasi tersebut melemah karena Amerika Serikat mulai membentuk milisi yang dikenal sebagai “Awakening Council” untuk mengeluarkan Al-Qaeda dari teritorinya di Iraq yang dimana banyak dari mereka yang dulunya berpartisipasi dengan pemberontakan di Iraq tetapi menjauhkan diri dari Al-Qaeda.<sup>151</sup>

Perang antara koalisi Amerika Serikat dengan gerakan teror di Afghanistan dan di Iraq –Al Qaeda dan Taliban– telah menjatuhkan korban penduduk sipil Iraq sebanyak 26.270 tewas dan 29.900 luka-luka serta 2.357 pasukan AS dan 1.130 pasukan aliansi terbunuh sedangkan untuk pasukan militan Taliban dan juga Al Qaeda tidak bisa dipastikan jumlah total yang terbunuh tetapi dapat diperkirakan kemungkinan bisa sampai lebih dari 35.000 militan tewas di Afghanistan.<sup>152</sup> Mengenai kerugian finansial berdasarkan laporan dari *Congressional Research Service* mengestimasi bahwa perang di Afghanistan yang dimulai dari tahun 2001 sampai dengan 2014 telah menghabiskan 686 miliar dollar –kurang lebih sekitar 10.000 triliun rupiah bila dollar ke rupiah lebih dari 15,000– , sedangkan Perang di Iraq menghabiskan 815

---

<sup>151</sup> ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. (2008). Al-Qaeda in Iraq. Retrieved from: <https://www.britannica.com/topic/al-Qaeda-in-Iraq>

<sup>152</sup> Crawford, N. C. (2015). War-related Death, Injury, and Displacement in Afghanistan and Pakistan 2001-2014. Cost of War, 1-2.

miliar dollar, bila ditambah dengan biaya peningkatan keamanan dan biaya lain maka totalnya mencapai lebih dari 1,6 triliun dollar –kurang lebih 24.000 triliun rupiah–.<sup>153</sup>

## **B. INTERVENSI US-LED COALITION DALAM MELAWAN ISIS**

Sesuai perkembangan ISIS di Iraq –ISIS pada waktu itu telah menguasai beberapa wilayah salah satunya Tel Afar yang jaraknya tidak jauh dari Baghdad–, maka pada pertengahan Juni 2014 Barrack Obama mengirimkan 275 personel militer untuk meningkatkan keamanan Kedutaan dan warga negara Amerika Serikat yang berada di Iraq.<sup>154</sup> Selain itu Barrack Obama menyatakan akan mengirimkan 300 penasihat militer untuk membantu pasukan Iraq dalam meningkatkan serta melakukan *counter-offensive* melawan gerakan ISIS.<sup>155</sup>

Lalu pada awal Agustus 2014 pergerakan ISIS semakin brutal di Iraq. selain sudah menguasai beberapa kota, Mereka juga mulai menyerang beberapa kota lainnya khususnya di daerah Sinjar mereka menghancurkan tempat peribadatan Syiah, mengeksekusi penentang, menyerbu pasukan keamanan, serta menaikan bendera mereka di atas gedung-gedung pemerintahan, sehingga membuat kurang lebih

---

<sup>153</sup> Thompson, M. (2015, Januari 1). The True Cost of the Afghanistan War May Surprise You. Retrieved from : <http://time.com/3651697/afghanistan-war-cost/>

<sup>154</sup> Lewis, P. (2014, June 17). Iraq crisis: Barack Obama sends in US troops as Isis insurgency worsens. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2014/jun/17/barack-obama-sends-troops-back-to-iraq-as-crisis-worsens>

<sup>155</sup> Lewis, P., & Ackerman, S. (2014, June 20). Obama to send up to 300 'military advisers' to help Iraqi army repel Isis. Retrieved from: <https://www.theguardian.com/world/2014/jun/19/obama-100-special-forces-iraq>

200 ribu warga Yazidi melarikan diri dari tempatnya.<sup>156</sup> Hal itu membuat Barrack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat memerintahkan Angkatan Udara untuk selain mengirimkan bantuan berupa air bersih, makanan, dan juga obat-obatan.<sup>157</sup> Juga mengerahkan sebanyak 146 serangan udara di beberapa wilayah di Iraq –Mosul Dam, Irbil, Haditha, Sinjar, Haditha, Amirli, Kawju– sepanjang bulan Agustus 2014.<sup>158</sup>

Sehingga ISIS seringkali menantang AS dengan melakukan beberapa pemenggalan di masa itu –bahkan terus dilakukan mereka sampai kedepannya–. Beberapa dari korban pemenggalan tersebut merupakan warga dari negara lain sebagaimana jurnalis Amerika James Foley dan Steven Sotloff yang masing-masing pemenggalan berada dalam rentang waktu yang tidak jauh –pada 19 Agustus dan 2 September 2014–, kejadian tersebut pun direkam serta disebarluaskan ke internet. Tujuan ISIS dalam melakukan Pemenggalan kepada kedua jurnalis tersebut, sesuai dengan pernyataan eksekutor yang berada di dalam video pemenggalan Steven Sotloff, ialah untuk memperingatkan sekaligus mengancam Amerika Serikat untuk tidak melanjutkan operasi militer, khususnya serangan udara terhadap Islamic State.<sup>159</sup>

---

<sup>156</sup> Arango, T. (2014, August 3). Sunni Extremists in Iraq Seize 3 Towns From Kurds and Threaten Major Dam. Retrieved from: <https://www.nytimes.com/2014/08/04/world/middleeast/iraq.html>

<sup>157</sup> ABC News . (2014, August 7). Obama Authorizes Air Strikes, Humanitarian Aid Mission in Iraq. Retrieved from: <https://abcnews.go.com/International/obama-authorizes-air-strikes-iraq/story?id=24884633>

<sup>158</sup> Sedghi, A., & Arnett, G. (2014, September 3). US military Isis air strikes in Iraq: day-by-day breakdown. Retrieved from: <https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/aug/27/us-military-isis-air-strikes-in-iraq-day-by-day-breakdown>

<sup>159</sup> McCoy, T. (2014, September 3). The bloodlust behind the Islamic State's beheading of Steven Sotloff. Retrieved from:

Hal itu tidak membuat pihak Pemerintah Amerika Serikat merasa terintimidasi dengan menghentikan operasi militernya melawan ISIS. Sebaliknya Pemerintahan ini justru mulai membangun aliansi dalam perlawanan terhadap ISIS di Iraq dan Suriah tersebut. Yaitu pada 5 September 2014 pembentukan aliansi direpresentasikan oleh Menteri Pertahanan Chuck Hagel dan Menteri Luar Negeri John Kerry dalam NATO Summit. Yang dimana mereka mendesak beberapa representatif dari negara lainnya yang tergabung dalam NATO –Britania Raya, Prancis, Australia, Jerman, Kanada, Turki, Italy, Poland, dan Denmark– untuk meminjamkan dukungan finansial dan Militer dalam pertempuran melawan Islamic State of Iraq and Syria –ISIS–. yang kemudian disepakati oleh aliansi NATO dalam memberikan dukungan berupa pasukan anti-ISIS di Suriah dan Irak juga dalam bentuk suplai dan dukungan udara. yang mana hal ini sesuai dengan statemen dari Kerry and Hagel:

*“This morning we had a meeting with some of our key allies and partners on the serious threat that [ISIS] poses to Iraq, the entire region, and the international community,” reads the statement. “We and the Ministers agreed here today that there is no time to waste in building a broad international coalition to degrade and, ultimately, to destroy the threat posed by [ISIS].”<sup>160</sup>*

Begitu juga pada tanggal 10 September Presiden Obama di *white house* memberikan statemen sebagai pernyataan formal atas dimulainya perlawanan dalam menghadapi ISIS. pernyataan tersebut yaitu:

---

[https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/09/03/the-bloodlust-behind-the-islamic-states-beheading-of-steven-sotloff/?utm\\_term=.66fc281f9f6f](https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/09/03/the-bloodlust-behind-the-islamic-states-beheading-of-steven-sotloff/?utm_term=.66fc281f9f6f)

<sup>160</sup> Denver, N. (2014, September 5). U.S. Forms Anti-ISIS Coalition at NATO Summit. Retrieved from Time: <http://time.com/3273185/isis-us-nato/>



*“Our objective is clear: We will degrade, and ultimately destroy, ISIL through a comprehensive and sustained counterterrorism strategy.”*

Selain itu pula dalam waktu sama beliau menyatakan strategi yang akan dilakukan kedepannya. Strategi yang dinyatakan tersebut ialah:

*So this is our strategy. And in each of these four parts of our strategy, America will be joined by a broad coalition of partners. Already, allies are flying planes with us over Iraq; sending arms and assistance to Iraqi security forces and the Syrian opposition; sharing intelligence; and providing billions of dollars in humanitarian aid. Secretary Kerry was in Iraq today meeting with the new government and supporting their efforts to promote unity. And in the coming days he will travel across the Middle East and Europe to enlist more partners in this fight, especially Arab nations who can help mobilize Sunni communities in Iraq and Syria, to drive these terrorists from their lands. This is American leadership at its best: We stand with people who fight for their own freedom, and we rally other nations on behalf of our common security and common humanity.”<sup>161</sup>*

Pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai tanda atas upaya untuk mulai dibentuknya koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam perlawanannya terhadap ISIL yang pertama kali beranggotakan AS, dan anggota NATO lainnya namun kedepannya Amerika Serikat untuk memperbanyak partner selain dari negara Eropa namun dibutuhkan juga partisipasi negara lain khususnya negara-negara Arab –juga negara-negara lainnya di wilayah Timur Tengah–yang dapat membantu memobilisasi komunitas sunni

---

<sup>161</sup> the White House . (2014, September 10). Statement by the President on ISIL. Retrieved from the White House: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1>

di Iraq dan Suriah, untuk mendorong kelompok-kelompok teroris tersebut dari kawasannya.

Setelah dikeluarkannya statement dari Presiden Obama yang disebutkan sebelumnya, maka beberapa hari setelahnya diadakanlah pertemuan yang bertajuk “Conference Internationale Sur La Paix et la Securite en Irak” –Konferensi Internasional atas Kedamaian dan Keamanan di Iraq– yang berlangsung di Paris pada tanggal 15 September 2014 dan diikuti oleh 26 negara –Bahrain, Belgia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Mesir, Prancis, Jerman, Iraq, Italia, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Belanda, Norwegia, Oman, Qatar, Russia, Arab Saudi, Spanyol, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat– dan beberapa representasi Organisasi Internasional –Liga Arab, Uni Eropa, dan PBB–. Dari pertemuan tersebut telah menghasilkan beberapa konklusi yaitu:

- Partisipan konferensi tersebut menyatakan ISIS sebagai ancaman bukan hanya bagi Iraq tetapi juga untuk keseluruhan komunitas internasional serta mengutuk atas perbuatan kriminal dan kekerasan massal yang dilakukan Daesh –nama lain ISIL– terhadap penduduk sipil, termasuk minoritas yang mudah diserang. Dari hal itu mereka mengkonfirmasi dukungan terhadap penyelidikan yang dipimpin oleh *High Commissioner for Human Rights*.
- Seluruh partisipan menggaris bawahi kebutuhan mendesak untuk menghapus Daesh dari wilayah yang mereka bangun di Iraq. Sampai akhir mereka –seluruh partisipan– mendukung pemerintahan baru Iraq dalam perlawanannya terhadap Daesh, dalam arti penting, termasuk dukungan militer yang pantas, sesuai dengan kebutuhan yang diungkapkan oleh otoritas Iraq, yang disesuaikan dengan hukum internasional dan tanpa membahayakan keamanan penduduk sipil.
- Setiap Partisipan konferensi juga menegaskan kembali komitmen mereka terhadap resolusi yang relevan

daripada Dewan Keamanan PBB dalam perlawanan terhadap teroris dan sumber rekrutmen dan finansial, khususnya Resolusi 2170. Dan menjamin resolusi ini di implemntasi dengan baik dan akan mengambil langkah penting untuk menjamin bahwa resolusi tersebut memiliki efek yang signifikan. Mereka sungguh mempercayai bahwa aksi yang tegas adalah hal penting untuk membasmi Daesh, khususnya langkah untuk mencegah radikalisasi, koordinasi antara setiap jasa keamanan dan pengendalian perbatasan yang tepat. Mereka menerima prospek kerja atas perencanaan aksi untuk mencegah pendanaan teroris.

- Menyatakan kembali dukungan terhadap pemerintah Iraq, partner internasional menarik kembali kebutuhannya untuk mendukung permintaan masyarakat Iraq atas pengawasan hak asasi manusia di dalam sebuah *federal framework* yang menghormati konstitusi hak regional dan kesatuan nasional.
- Mereka mengakui peran yang dimainkan oleh PBB di Iraq, khususnya dalam menkoordinasi dan memfasilitasi bantuan internasional kepada pemerintah Iraq. Partisipan konferensi juga mengakui bahwa Liga Arab dan Uni Eropa merupakan partner strategis dalam jangka panjang terhadap keperluan Iraq.
- Partisipan konferensi sepakat untuk melanjutkan dan meningkatkan ketentuan bantuan darurat kemanusiaan pada pemerintah iraq dan otoritas lokal, tergantung pada perubahan situasi di lapangan, dengan tujuan untuk membantu mengakomodasi mereka dan membantu pencari suaka dan orang-orang yang terlantar, yang seharusnya dapat kembali kerumah mereka dengan aman.
- Partner-partner internasional menyatakan bahwa mereka telah bersedia untuk membantu Iraq dalam pekerjaan rekonstruksinya, dengan tujuan untuk

menggapai pembangunan regional yang cukup, khususnya dengan menyediakan keahlian, pengetahuan dan bantuan finansial yang pantas, sebagai contoh, dana global yang spesifik untuk membantu rekonstruksi pada area yang dihancurkan oleh Da'esh (ISIL)

- Partner-partner internasional sepakat untuk tetap memobilisasi bantuan mereka untuk otoritas Iraq dan dalam perlawanan terhadap Da'esh (ISIL) secara penuh. Mereka akan menjamin bahwa komitmen yang dibuat hari ini diimplementasi dan ditindaklanjuti, terutama dalam framework PBB dan selama pertemuan tingkat tinggi akan dipegang disamping Majelis Umum PBB.<sup>162</sup>

Berlanjut lagi dengan diadakannya pertemuan di Brussel, Belgia pada 3 Desember yaitu pertemuan pleno untuk pertimbangan substantif antar kementerian tingkat pertama atas *Global Coalition to Counter the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)*. Dengan Perdana Menteri Iraq Haidar al-Abadi dan utusan khusus Presiden Obama John Allen sebagai pemimpin jalannya koalisi.<sup>163</sup> Pertemuan ini ditujukan kepada 66 representatif dari setiap negara yang hadir dalam pertemuan tersebut, yang dimana sebelumnya telah sepakat untuk berkontribusi pasukan militer dan sumber dayanya dalam kampanye untuk mengkonter-Da'esh. Upaya yang akan dilakukan setiap partisipan kedepannya dalam *Global coalition* terfokus kepada:

---

<sup>162</sup> gouvernement. (2014, September 15). International Conference on Peace and Security in Iraq; Conclusions of the International Conference on Peace and Security in Iraq. Retrieved from gouvernement.fr: <https://www.gouvernement.fr/en/international-conference-on-peace-and-security-in-iraq>

<sup>163</sup> U.S. Department of State. (2014, December 3). Joint Statement Issued by Partners at the Counter-ISIL Coalition Ministerial Meeting. Retrieved from U.S. Department of State: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/12/234627.htm>

1. Menopang operasi militer, *capacity building*, dan pelatihan (dipimpin oleh Amerika Serikat dan Iraq);
2. Menghentikan arus pejuang teroris asing –berasal dari negara lain– (dipimpin oleh Belanda dan Turki);
3. Memotong akses akses atas finansial dan pendanaan (dipimpin oleh Italia, Kerajaan Arab Saudi, dan Amerika Serikat);
4. Menyinggung dalam hal yang berkaitan dengan pembebasan dan krisis humaniter (dipimpin oleh Jerman dan Uni Emirat Arab); dan
5. Membongkar sifat dasar IS yang sebenarnya (dipimpin oleh Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat).

Berdasarkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, 66 partisipan dalam koalisi itu tidak hanya representatif dari negara saja tetapi juga oleh organisasi internasional. Beberapa representatif tersebut termasuk Afghanistan, Albania, Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Austria, Bahrain, Belanda, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Georgia, Hungaria, Iceland, Inggris, Iraq, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Kosovo, Kroasia, Kuwait, Latvia, Libanon, Liga Arab, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Maroko, Mesir, Moldova, Montenegro, Nigeria, Norwegia, Oman, Panama, Polandia, Portugal, Prancis, Qatar, Republik Ceko, Republik Korea, Romania, Selandia Baru, Serbia, Singapura, Siprus, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spanyol, Swedia, Taiwan, Tunisia, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Yordania, dan Yunani.

Setiap negara berkontribusi pada koalisi dengan sikapnya yang sepadan dengan kepentingan nasional dan keuntungan komparatif. Kontribusi itu bisa termasuk bantuan militer dan non-militer, meskipun pelaporan atas kontribusi non-militer cenderung menjadi sporadik, sebagaimana banyak negara yang mendonasikan bantuan humaniter secara langsung

kepada pemerintah lokal atau kepada NGO *–non-governmental organization–* yang beroperasi di area sekitar. Suatu contoh ilustratif pada bentuk bilateral atas ketersediaan bantuan negara negara sebagai koalisi untuk menkonter-IS yang telah terbentuk pada september 2014 termasuk: Donasi sebesar 9 juta dollar dari Switzerland untuk *aid* –pertolongan atau alat bantu– kepada Iraq, Belgium mengontribusikan 13 ton alat bantu kepada Iraq secara umum, Italia Berkontribusi persenjataan (termasuk senapan mesin, granat, dan sekitar 1 juta amunisi) senilai 2.5 juta dollar. Dan Jepang memberikan 6 juta dollar dalam bantuan darurat yang secara spesifik ditujukan untuk membantu orang-orang yang terlantar di Iraq Utara.<sup>164</sup>

Tetapi di dalam pertemuan-pertemuan tersebut tentu saja tidak hanya Da'esh yang berada di wilayah Iraq saja yang menjadi perhatian, Daesh yang menetap Suriah juga telah menyebabkan krisis humaniter berupa korban dan pencari suaka yang mengkhawatirkan –serta dianggap ancaman internasional–. Dalam kaitan tersebut pemerintah Suriah sudah mencoba untuk membuka diri dengan dunia internasional, yaitu dengan meminta bantuan militer dan turut serta membantu dalam konfrontasi melawan peningkatan ancaman dari ISIS. Tetapi memperingati Amerika Serikat untuk tidak melakukan serangan udara pada teritorinya tanpa persetujuan pemerintah Suriah, apabila AS melakukan serangan seperti itu maka akan dianggap sebagai agresi.

Hal itu sesuai dengan pernyataan menteri luar negeri Suriah, Walid al-Moallem yang menyatakan bahwa pemerintahannya siap untuk melakukan kerja sama dan kordinasi dengan setiap pihak, termasuk Amerika Serikat, atau ikut bergabung dengan aliansi internasional maupun regional melawan ISIS. Tetapi dia mengatakan setiap tindakan militer di Suriah harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan

---

<sup>164</sup> McClinnis, K. J. (2016). *Coalition Contributions to Countering the Islamic State*. Washington: Congressional Research Service.

pemerintah Suriah, jika tidak maka akan dianggap sebagai agresi.<sup>165</sup>

Namun justru Barrack Obama mengatakan—di dalam pidato yang disebutkan sebelumnya— bahwa dia tidak ragu untuk mengambil tindakan melawan ISIS di Suriah sebagaimana yang dilakukannya di Iraq, yaitu dengan melakukan serangkaian serangan udara dan operasi militer lainnya yang sistematis di kedua negara tersebut. tepat pada tanggal 23 September 2014 Amerika Serikat bersama dengan Bahrain, Yordania, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Qatar telah menjatuhkan serangan udara di Suriah. Selain itu total 47 misil Tomahawk telah diluncurkan dari USS Arleigh Burke dan USS Philipine Sea —kapal perang milik Amerika Serikat— yang beroperasi di laut internasional. Serangan itu merupakan serangan pertama namun setelah itu serangkaian serangan udara maupun operasi militer lainnya yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan aliansinya justru tetap berlanjut sampai kedepannya di Suriah.<sup>166</sup>

Sampai pada 17 Oktober 2014 Department of Defense —Kementrian Pertahanan Amerika Serikat—, secara formal membentuk *Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve* (CJTF-OIR) yang ditujukan untuk merumuskan operasi militer —yang sebelumnya operasi ini belum memiliki nama walaupun operasi militer sudah digalakan— oleh US-Led Coalition kedepannya dalam melawan peningkatan ancaman yang ditunjukkan oleh ISIS di Iraq dan Suriah. Namun dalam

---

<sup>165</sup> The Guardian. (2014, August 26). Syria offers to help fight Isis but warns against unilateral air strikes. Retrieved from TheGuardian.com:

<https://www.theguardian.com/world/2014/aug/26/syria-offers-to-help-fight-isis-but-warns-against-unilateral-air-strikes>

<sup>166</sup> Chulov, M., Ackerman, S., & Lewis, P. (2014, September 23). US confirms 14 air strikes against Isis in Syria. Retrieved from The Guardian : <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/23/us-launches-air-strikes-against-isis-targets-in-syria>

misi mereka tertera frasa *...sets conditions for follow-on operations* yang dimana negara anggota US-Led Coalition tidak hanya akan menggunakan pendekatan militer tetapi dengan kekuatan penuh dari kekuatan nasionalnya yaitu dengan berbagai aspek yang termasuk diplomatik, informasional, ekonomik, pelaksanaan hukum, dan aspek lainnya, Mereka meyakini bahwa mereka tidak hanya harus menundukan kekuatan militer ISIS, tetapi juga harus menghancurkan ideologi ISIS yang sebagaimana ditujukan untuk menghentikan arus global *foreign fighter* dan jihadist yang teradikalisasi di setiap negara.<sup>167</sup>

Sejak dimulainya operasi militer yang digalakan oleh US-led Coalition Sampai dengan Agustus 2017, berdasarkan data dari website resmi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat bahwa koalisi tersebut telah meluncurkan total 24,566 serangan udara yang 13,331 diantaranya di luncurkan ke Iraq dan 11,235 diluncurkan ke Suriah. Selain itu juga CJTF-OIR telah melayangkan serangan dadakan berjumlah 167,912. Operasi militer ini sampai dengan Juni 2017 telah menghabiskan 14,356 juta dollar –atau sekitar 200 triliun rupiah yang dimana dana tersebut termasuk dalam biaya amunisi, upah militer, dukungan logistik, dukungan operasional dll.<sup>168</sup>

Walaupun Amerika Serikat dan Suriah dapat melihat ISIL sebagai musuh bersama. Bagaimanapun kooperasi antara kedua negara ini adalah mustahil. Karena Amerika serikat tidak mengakui legitimasi daripada Pemerintah Suriah. Hal itu dikarenakan pernyataan dari pemerintah Suriah tersebut diabaikan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan

---

<sup>167</sup> Operation Inherent Resolve. (2014). About CJTF-OIR. Retrieved from inherent resolve.mil: <http://www.inherentresolve.mil/About-Us/>

<sup>168</sup> U.S. Department of Defense. (n.d.). Operation Inherent Resolve; Targeted Operation to Defeat ISIS. Retrieved from: <https://dod.defense.gov/OIR/News-Archive/Tag/91078/?Page=2>



meluncurkan serangan-serangan udara secara tidak legal, tidak diakui, dan tanpa ada persetujuan dari pemerintah Suriah itu sendiri. Ditambah pula Serangan udara tersebut diyakini lebih besar daripada serangan udara yang dilakukan di Iraq yaitu dengan meluncurkan 14 serangan udara dalam satu hari. Dengan demikian, dalam pengeboman yang menarget ISIS di Suriah, klaim dari Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa menggunakan angkatan militer untuk *self-defence* ataupun atas permintaan Suriah untuk menekan pemberontakan tidak dapat dipercaya oleh Suriah.<sup>169</sup> Sehingga di masa mendatang justru Suriah lebih mengandalkan teman lamanya yaitu dari pihak Russia dan Iran dalam permintaanya untuk menangani pemberontakan dan terorisme di dalam kawasan teritorinya.

Dalam hal ini mengkonter ISIS memang merupakan tujuan utama daripada keterlibatan Amerika Serikat di Suriah dan Iraq. Efek terbesar pada kebijakan konter-ISIS Amerika Serikat berada di Iraq, dimana bantuan militer Amerika Serikat mendukung upaya pasukan pemerintah Iraq untuk mengambil alih kembali area strategis yang penting seperti Mosul. Pihak Amerika Serikat bersamaan dengan itu juga menekan mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki, seorang yang dalam kebijakannya telah meng-antagoniskan sunni, untuk mengundurkan diri di tahun 2014. di Suriah bagaimanapun, selain menghancurkan ISIS Amerika Serikat juga memiliki objektif lainnya, seperti menjatuhkan rezim Suriah –rezim Bashar al Assad–, membatasi capaian Iran dan peningkatan pengaruh Russia di Suriah, pencegahan penggunaan senjata pemusnah massal dalam konteks perang sipil, dan pembatasan spillover. Dalam hal ini pihak Amerika Serikat sendiri terlihat

---

<sup>169</sup> Farrell, T. (2014, September 23). Are the US-led air strikes in Syria legal - and what does it mean if they are not? Retrieved from: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/1116792/Are-the-US-led-air-strikes-in-Syria-legal-and-what-does-it-mean-if-they-are-not.html>

seperti telah mengadopsi kebijakan yang *multifaceted* – memiliki banyak aspek– dan bahkan bertentangan di Suriah.<sup>170</sup>

### C. INTERVENSI RUSSIA BERSAMA DENGAN ALIANSINYA

Setahun setelahnya yaitu pada September 2015, pihak dari Russia baru mulai menentukan sikapnya mengenai ancaman ISIS. Dengan mendirikan *joint information centre* – pusat informasi bersama–dengan sekutunya yaitu Suriah, Iraq dan Iran –ditambah dengan Hezbollah dari Lebanon–. Yang dimana institusi tersebut ditempatkan di Baghdad dan dimaksudkan untuk kooperasi dalam pengumpulan informasi tentang ISIS, yang dimana setiap representatif negara melakukan koordinasi dalam intelejen militer, mengarahkan dalam berbagi dan menganalisis informasi serta memonitoring pergerakan terorisme dan menurunkan kapasitasnya.<sup>171</sup>

Hal tersebut ditandai dengan Pidato Vladimir Putin sebagai Presiden Federasi Russia di dalam Majelis Umum PBB , yaitu setelah dimulainya keterlibatannya di Suriah. dalam permasalahan terorisme di Suriah di Iraq beliau mengatakan mengenai bahayanya di masa mendatang serta menyatakan kekonsistenan Federasi Rusia untuk selalu melawan segala bentuk terorisme. Selain itu beliau menunjukan dukungannya pada pemerintahan Bashar Al Assad dengan menyatakan bahwa penolakan kooperasi dengan pemerintah Suriah dan pasukan bersenjata merupakan kesalahan besar karena menurutnya tidak ada satupun selain

---

<sup>170</sup> Oktav, O. Z., Dal, E. P., & Kursun, A. M. (2018). *Violent Non-state Actors and the Syrian Civil War* . Istanbul: Springer.

<sup>171</sup> Imran, K. (2015, Sept 27). Iraq, Russia, Iran and Syria coordinate against ISIL. Retrieved from: <https://www.aljazeera.com/news/2015/09/iraq-russia-iran-syria-coordinate-isil-150927125919507.html>

pasukan bersenjata Pemerintah Suriah dan milisi Kurdis yang benar benar berjuang melawan ISIS dan teroris lainnya di Suriah. Di sisi lain Presiden Putin juga mengajak negara lain untuk bergabung pada front bersama yang dianggapnya sama dengan koalisi “*anti-hitler*”, yang dimana dapat menyatukan pasukan dari berbagai negara yang dengan tegas menentang siapapun yang seperti layaknya Nazis, menebarkan kejahatan dan kebencian pada kemanusiaan <sup>172</sup>

Pada akhir September 2015 Russia mulai menjalankan serangan udara pertamanya di Suriah yang dimana posisi targetnya ialah gedung maupun kendaraan yang dipercaya Russia sebagai sarana yang dimiliki oleh kelompok ISIS. Serangan udara tersebut merupakan kebijakan Presiden Vladimir Putin yang diumumkan dua hari setelah pidatonya tersebut di Majelis Umum PBB. Tujuan operasi ini secara eksklusif merupakan sokongan serangan udara kepada pasukan bersenjata Suriah dalam pertempurannya melawan ISIS. <sup>173</sup>

Pada Oktober 2015 pihak Russia pernah mengajak pihak pemerintah Amerika Serikat untuk mendiskusikan dalam melakukan koordinasi aksi anti teroris di Suriah dan Iraq dengan mengirimkan delegasi yang dikepalai oleh Perdana Menteri Dimitri Medvedev dan/atau meminta delegasi dari Washington untuk datang ke Moscow yang Presiden Putin katakan sebelumnya di pidatonya tersebut untuk mengajak negara lain bergabung dengan koalisi “*anti hitler*” tersebut. Tetapi mereka mendapat respon yang tidak konstruktif yang

---

<sup>172</sup> Washington Post . (2015, September 28). Read Putin’s U.N. General Assembly speech. Retrieved from: [https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/28/read-putins-u-n-general-assembly-speech/?utm\\_term=.88979f87241a](https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/28/read-putins-u-n-general-assembly-speech/?utm_term=.88979f87241a)

<sup>173</sup> Al Jazeera. (2015, September 30). Russia carries out first air strikes in Syria. Retrieved from: <https://www.aljazeera.com/news/2015/09/russian-carries-air-strikes-syria-150930133155190.html>

dimana mereka diinformasikan bahwa pihak AS tidak akan mengirimkan delegasinya ke Moskow dan diwaktu yang sama mereka tidak mau menerima delegasi Russia ke Washington. Di dalam ajakan tersebut pihak Russia bermaksud untuk mengajak partner lainnya untuk mengambil bagian dalam aktivitas pusat informasi –operasi intelejen di Baghdad seperti yang dikatakan sebelumnya–, namun mereka mendapatkan respon yang tidak konstruktif dikarenakan pihak AS ragu terhadap operasi tersebut dan lebih memilih untuk memisahkan diri dengan aliansi yang dibangun oleh Russia.<sup>174</sup>

Alasan Rasionil keterlibatan Rusia khususnya di Suriah didasari atas dua hal. Pertama, Rusia ingin menjamin pemerintahan Bashar al Assad di Suriah, atau setiap pemerintahan yang menerima atau meminta untuk dipertahankan Rusia. Yang dimana Pemerintah Rusia berusaha untuk menjamin pemerintah Suriah tidak diganggu oleh serangan militer dari aktor eksternal. Dalam upayanya tersebut Rusia secara signifikan meningkatkan markas militernya di Suriah.<sup>175</sup> Dalam hal ini setidaknya Terdapat dua pangkalan militer Rusia yang dibangun ataupun diambil alihnya di Suriah yaitu di pelabuhan militer Tartus, dan pangkalan udara Khmeimim. Selain itu sokongan dari Russia juga meliputi penasihat intelejen, bantuan finansial, dan juga alutsista.<sup>176</sup>

Di tahun 2016 Russia mengumumkan pembentukan kesatuan militer keempat –atau juga dikenal sebagai *Red Line*–

---

<sup>174</sup> RT. (2015, October 14). US refuses to receive PM Medvedev's delegation to coordinate anti-terrorist actions in Syria. Retrieved from: <https://www.rt.com/news/318634-us-refusal-russian-delegation/>

<sup>175</sup> Oktav, O. Z., Dal, E. P., & Kursun, A. M. (2018). *Violent Non-state Actors and the Syrian Civil War*. Istanbul: Springer. Hal. 159

<sup>176</sup> Crilly, B. (2015, September 5). Russia 'is Building military Base in Syria'. Retrieved from: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11846382/Russia-is-building-military-base-in-Syria.html>

yang dimana kesatuan militer tersebut berisi dari brigade dan batalion dari tentara rezim Suriah yang ditempatkan dibawah komando opsir Rusia yang mengawasi pelatihan, sistem pertahanan, suplai amunisi, penyebaran dan seluruh cakupan perencanaan militer. Disisi lain Bashar al Assad mengumumkan pembentukan kesatuan militer kelima yang berpusat di Kamp Pasukan Garis Depan Latakia ditambah juga dengan terbentuknya kesatuan militer keenam di Qatana sebagai pasukan cadangan yang keduanya tentu berada dibawah pengawasan opsir Rusia.<sup>177</sup>

Kedua, Pemerintah Rusia secara nyata menghadapi ancaman serius dari ISIS, bahkan ancaman itu mungkin lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. Rusia berada diantara tiga besar pengekspor pejuang ISIS dan kelompok jihadis lainnya di Suriah dan Iraq<sup>178</sup>. ISIS sendiri telah membuat kemajuan dalam perekrutannya dari Kaukasus Utara termasuk dari komunitas imigran di kota utama yang dimana Akbarzhon Dzhililov –merupaka seorang warga Russia yang lahir di Krygistan yang menjadi pelaku utama pengeboman di St Petersburg–, dan diestimasikan sekitara 5000-7000 pejuang ISIS berasal dari Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet.<sup>179</sup> Ketika mengalirnya jihadist dari wilayahnya ke Suriah dan Iraq akan mengurangi persepsi ancaman internal Rusia, prospek kembalinya mereka adalah sumber kekhawatiran.

Begitu juga radikalisasi di Asia Tengah sebagai ancaman pada keamanan nasional dan stabilitas dari negara tetangganya. Statistik yang disebutkan sebelumnya salah

---

<sup>177</sup> Lazkani, A. (2018, June 21). Russian Forces in Syria and the Building of a Sustainable Military Presence - I. Retrieved from: <https://www.arab-reform.net/en/node/1309>

<sup>178</sup> Oktav, O. Z., Dal, E. P., & Kursun, A. M. (2018). *Violent Non-state Actors and the Syrian Civil War*. Istanbul: Springer.

<sup>179</sup> Bremmer, I. (2017, April 14). *The Top 5 Countries Where ISIS Gets Its Foreign Recruits*. Retrieved from: <http://time.com/4739488/isis-iraq-syria-tunisia-saudi-arabia-russia/>

satunya merupakan berasal dari Asia Tengah. Hal ini menjadi lebih kejam dikarenakan rekrutmen anggota yang berasal dari Asia Tengah merupakan anggota yang telah membangkitkan posisi menonjol dalam organisasi jihadis, termasuk ISIS, dan beberapa serangan teror yang melewati Eropa –termasuk penembakan malam perayaan tahun di Istanbul, serangan di Stockholm di Bulan April 2017, dan serangan St Petersburg April 2017– umumnya pelakunya berasal Asia Tengah.<sup>180</sup>

Sedangkan jika kita merujuk ke Iran, Kebijakan Luar negeri-nya menjadi sangat jelas berubah ketika keberadaan ISIS mengancam kepentingan geostrategis Iran. Ancaman yang diajukan ISIS berakibat dalam transformasi kebijakan luar neger Iran. Iran mengehtikan upaya kerasnya untuk menyatukan seluruh muslim dan justru sebaliknya memperjuangkan hak Syiah sebagai pertarungannya melawan ISIS di perbatasan –perbatasan Iran dengan Irak–. Hal tersebut dikarenakan ISIS telah bersumpah untuk menghabisi Syiah dan membangun kekhalifahan Arab Sunni di Timur Tengah. Tentu saja hal tersebut menjadi ancaman bagi Iran mengingat Iran merupakan negara dengan mayoritas penduduk berkeyakinan Syiah. Walaupun sejak tahun 2010 antara Iran dan Iraq memiliki kedekatan diplomatik –yang dimana mereka telah menandatangani 100 perjanjian kooperasi–, namun dengan kedatangan ISIS tersebut di Iraq, membuat Iran menghadapi prospek ancaman di perbatasan. Sehingga di masa mendatang antara kedua negara banyak melakukan pertemuan contohnya ialah pertemuan pada April 2013 yang dimana Heidar Moslehi Menteri Intelegjensia Iran, mendatangi Iraq untuk membantu menangani aktivitas teroris, termasuk pelatihan militer dan mempersenjatai polisi setempat.<sup>181</sup>

Pemerintah Iran juga –setelah kehadiran ancaman ISIS– mulai mengikuti kebijakan seperti negara-bangsa yang

---

<sup>180</sup> Op Cit. Hal. 160

<sup>181</sup> Efsandiary, D., & Tabatabai, A. (2015). Iran's ISIS Policy . International Affairs, Volume 91, Issue 1, 1-15.

memprioritaskan perekonomian dan kepentingan geostrategisnya dibandingkan kebijakan luar negeri yang disetir secara ideologis. Selain itu perang proksi Iran di Suriah dan Iraq dengan ISIS berkembang dengan lebih merugikan dalam upayanya untuk melebarkan kehadiran militer Iran yang mengharapkan untuk mempertahankan kepentingannya maka pemerintah Iran mengirimkan 100 pasukan Qud ke Iraq di pertengahan Juni 2014 dalam menghadapi peningkatan ancaman dari penyebaran ISIS. Iran Terjebak pada dua hal diantaranya adalah yaitu negara ini ingin memperjuangkan hak kelompok operasi melawan ISIS/Al-Qaeda atau mempertahankan kepentingan nasional dan ekonominya. Kemungkinan perolehan strategis dalam berhubungan dengan masyarakat internasional dan negara teluk dan menghapus sanksi yang dipandang oleh Pemerintah Iran sebagai jalan untuk menghapus stigma buruk Iran di hadapan dunia internasional. Sebagaimana persepsi ancaman Iran yang memuncak dikarenakan destabilisasi Iraq dan juga memburuknya hubungan dengan Arab Saudi berkaitan dengan krisis Yaman. Maka, keberlangsungan Rezim Assad sangat penting bagi Iran.<sup>182</sup>

#### **D. HASIL DAN KAUSALITAS**

Ketika membahas mengenai perang ataupun konflik maka sudah seharusnya membahas mengenai hasil dan kasualitas dari perang atau konflik tersebut, namun tulisan ini akan lebih menekankan pada penjelasan yang bukan hanya hasil dan kasualitas yang disebabkan langsung oleh ISIS atau kelompok kekerasan lainnya di Iraq dan Suriah –tidak melebar ke negara lain terlebih dahulu– tetapi juga hasil dan kasualitas atas serangan dari aktor-aktor eksternal yang dalam kasus ini ialah dua koalisi yang sudah dibahas sebelumnya.

Dalam hal kasualitas Berdasarkan Iraq Body Count – lembaga website yang mencatat kematian penduduk sipil di Iraq yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di Iraq–,

---

<sup>182</sup> Op Cit. Oktav, O. Z., Dal, E. P., & Kursun, A. M. Hal. 190

jumlah angka kematian penduduk sipil di Iraq sejak 2014 berada di angka 68,260 sampai dengan akhir Februari 2018. Angka kasualitas pertahun menurun setiap tahunnya sejak 2014, dari 20,218 pada tahun tersebut sampai 13,187 di tahun 2017. Dan juga Syrian Observatory for Human Rights, kelompok monitoring yang bertempat di Inggris, melaporkan di tahun 2018 bahwa mereka telah mendokumentasikan kematian lebih dari 353,900 orang, termasuk 106,000 penduduk sipil, sejak pemberontakan kepada Bashar al Assad dimulai pada tahun 2011. Tetapi harap diperhatikan bahwa bilangan tersebut tidak termasuk 56,900 orang yang hilang dan diduga mati. Dan diestimasikan lebih dari 100,000 kematian tidak dapat terdokumentasi..<sup>183</sup>

Selain itu statistik dari UNHCR –United Nations High Commissioner for Refugees yaitu lembaga PBB yang menangani pengungsi, pencari suaka dll– menunjukkan bahwa semenjak 2011 sampai dengan april 2018 sekitar 5,6 penduduk sipil Suriah mengungsi ke negara lain yang masih dalam regional Timur Tengah dan Afrika Utara, dan 13,1 juta penduduk sipil yang membutuhkan bantuan humaniter yaitu 2,98 juta penduduk diantaranya masih berada di area terkepung, serta 6,6 juta merupakan IDP (*internally displaced person*: yaitu penduduk sipil yang telah dipindahkan ke tempat pengungsian yang aman dan diberikan akomodasi)–.<sup>184</sup>

Tabel 3.1

---

<sup>183</sup> BBC. (2018, Maret 28). Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps. Retrieved from [bbc.com](https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034):

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034>

<sup>184</sup> UNHCR. (2018). Syria Emergency. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/en-us/syria-emergency.html>



## Jumlah Pencari Suaka Berdasarkan Negara Tujuan

Lokasi	Sumber	Tanggal Data	Persen	Populasi
Turki	<i>Pemerintah Turki, UNHCR</i>	22 Nov 2018	63.8%	3,603,888
Libanon	<i>UNHCR</i>	31 Okt 2018	16.9%	951,629
Yordania	<i>UNHCR</i>	12 Nov 2018	11.9%	673,414
Irak	<i>UNHCR</i>	31 Okt 2018	4.5%	251,793
Mesir	<i>UNHCR</i>	31 Okt 2018	2.3%	132,029
Lain-Lain (Afrika Utara)	<i>UNHCR</i>	15 Mar 2018	0.6%	33,545

Sumber: <https://data2.unhcr.org/en/situations/syria>

Sedangkan dalam kasus Iraq dengan penduduknya yang berjumlah 37 juta 14 juta diantaranya tinggal di area konflik, dan 8,7 juta penduduk membutuhkan bantuan humaniter. Dari tahun 2014 sampai tahun 2018 jumlah IDP terus menambah dari awalnya 85,000 penduduk di awal tahun 2014 sampai 3,4 juta di tahun 2016 dan menurun menjadi 2,6 juta di tahun 2017, namun dari mereka banyak juga yang kembali ketempatnya masing masing puncak kembalinya mereka berada di tahun 2017 yaitu 3,2 juta penduduk. Dan mereka mendapatkan kehadiran dari 179 organisasi yang merespon bantuan kebutuhan humaniter di tahun 2017.<sup>185</sup> Hasil yang didapatkan cukup baik, diantaranya berdasarkan dari Intelejen Amerika Serikat yang mengatakan bahwa kurang dari 1000 pejuang ISIS masih menetap di Iraq dan Suriah, sangat jauh dari puncaknya di tahun 2015 yang hampir mencapai 45.000. US-led Coaliton sendiri berdasarkan klaim dari pemerintah Amerika Serikat, telah membunuh lebih dari 70.000 jihadis. Namun sayangnya, beberapa ribu lainnya kembali negaranya masing masing.<sup>186</sup> Dan pada tahun 2016

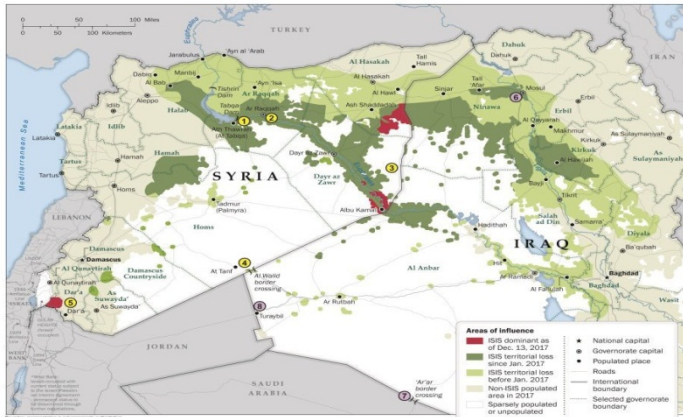
<sup>185</sup> UNOCHA. (2018). Humanitarian Response Need . UNOCHA.

<sup>186</sup> Tomlinson, L. (2017, December 27). ISIS has lost 98 percent of its territory -- mostly since Trump took office, officials say. Retrieved

AS mengakui telah membunuh lebih dari 120 anggota penting ISIS, yang termasuk pemimpin, komandan, propagandis, perekrut dan lain-lainnya.<sup>187</sup>

Grafik 3.1

**Area Pengaruh ISIS Akhir Tahun 2017**



Sumber : <https://www.businessinsider.sg/map-of-isis-territory-2017-12/?r=US&IR=T>

Selain itu di akhir tahun 2017, ISIS sendiri telah kehilangan 98 persen teritori yang pernah dipengangnya membentangi Iraq dan Suriah, yaitu lebih dari 40.000 mil –

---

from: <https://www.foxnews.com/politics/isis-has-lost-98-percent-of-its-territory-mostly-since-trump-took-office-officials-say>

<sup>187</sup> Hennigan, W. (2016, June 12). U.S. Military Says it has Killed more than 120 Islamic State Leaders. Retrieved from : <https://www.military.com/daily-news/2016/06/12/us-military-says-it-killed-more-120-islamic-state-leaders.html>

sekitar 107,572 KM<sup>2</sup> berdasarkan data dari website resmi Global Coalition–.<sup>188</sup>

## **E. LEGAL BASIS**

### **1. Resolusi Dewan Keamanan PBB**

Tujuan utama dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (baca, PBB) salah satunya ialah untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak berdirinya, PBB sering diminta untuk mencegah pertikaian agar tidak meningkat menjadi peperangan, untuk membujuk pihak-pihak supaya menggunakan meja konferensi dan bukannya kekuatan senjata, atau untuk membantu memulihkan kembali perdamaian ketika konflik meletus. Selama puluhan tahun PBB telah membantu mengakhiri sejumlah konflik dan membantu perkembangan rekonsiliasi di beberapa wilayah. Dengan Dewan Keamanan sebagai organ primer untuk mengurus isu-isu keamanan dan perdamaian internasional, serta Majelis Umum dan Sekretaris Jendral juga memainkan peran mayor, dalam melengkapi peran untuk membantu perkembangan kedamaian dan keamanan. Aktivitas-aktivitas PBB meliputi area-area utama pada pencegahan konflik, menjaga perdamaian, penyelenggaraan dan pembentukan perdamaian.<sup>189</sup>

Mengenai Dewan Keamanan dapat dilihat di BAB V Piagam PBB yang disitu dijelaskan tentang keanggotaan yang dimana terdapat anggota permanen –yaitu RRC, Prancis, Rusia, Britania Raya, Irlandia Utara, dan Amerika Serikat– dan anggota non permanen yang berjumlah 6 negara member, Serta peraturan voting dan argumentasi. Namun untuk tugas

---

<sup>188</sup> McIntyre, J. (2017, December 23). Here's how much ground ISIS has lost since Trump took over. Retrieved from : <https://www.washingtonexaminer.com/heres-how-much-ground-isis-has-lost-since-trump-took-over>

<sup>189</sup> United Nations. (2014). Basic Facts About United Nations. New York: Indonesia United Nations Information Center.

serta, wewenang dapat dilihat di bab, VII piagam PBB.<sup>190</sup> Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama: Dengan usaha penyelesaian sengketa secara damai. Biasanya pertama kali dengan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya dengan damai ditambah dengan memberikan rekomendasi solusi perdamaian. Atau ketentuan-ketentuan gencatan senjata untuk mencegah meluasnya konflik serta dengan menempatkan pengamat militer atau pasukan pengawas perdamaian ke wilayah konflik tersebut.<sup>191</sup>

Sedangkan yang kedua, yaitu dengan penyelesaian sengketa secara paksa pada tindakan ancaman, pelanggaran perdamaian dan keamanan serta tindakan agresi. yaitu dengan mengenakan embargo, sanksi, bahkan dapat mengesahkan penggunaan kekuatan militer oleh satu koalisi negara-negara atau oleh satu organisasi regional, atau melalui pengaturan pengaturan tertentu sebagai metode penyelesaian konflik di suatu wilayah. Namun tindakan semacam itu merupakan pilihan terakhir, ketika berbagai cara damai telah diupayakan dengan optimal. Dari sini dapat kita lihat bahwa pada hakekatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan.<sup>192</sup>

Mengenai kasus ISIS sendiri, dibentuknya Resolusi 2199 pada Februari 2015 yang berisi bahwa DK PBB sesuai dengan piagam PBB bab VII ditujukan untuk menyalahkan serta melarang setiap perdagangan minyak maupun perdagangan senjata secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>190</sup> United Nations. (1945). Charter of United Nations. San Francisco: United Nations. Retrieved from [treaties.un.org](http://treaties.un.org).

<sup>191</sup> Op Cit. Hal 56

<sup>192</sup> Ibid. Hal 56

dengan ISIS, Gerakan Al Nusra, dan entitas lain yang dibentuk pada asosiasi dengan Al-Qaeda Dibawah sanksi dari Resolusi 1267 dan 1989. Mereka juga mengecam penghancuran warisan budaya di Iraq dan Suriah oleh ISIS, Al-Nusrah dll. Mengakhiri pembawaan tawanan dari kelompok teroris. Juga melarang pembayaran uang tebusan kepada kelompok semacam itu, PBB menyatakan akan memanggil negara anggota untuk membantu mengamankan pembebasan tawanan tanpa bayaran dan konsesi politik. Serta mencegah kelompok mendapatkan akses pada institusi finansial internasional dan menguatkan negara-negara korban. Negara anggota juga wajib mencegah kelompok tersebut mendapatkan senjata dan material.<sup>193</sup>

Resolusi ini dimunculkan karena banyaknya negara yang melancarkan gerakan terorisme seperti Turki membiarkan para teroris, terutama anggota ISIS dan Front al-Nusra, masuk dari wilayahnya ke wilayah Suriah, sementara Israel menyuplai senjata dan fasilitas perang kepada Front al-Nusra melalui kawasan Golan. Ditambah dengan adanya tempat-tempat pelatihan ISIS di Turki, Arab Saudi, Qatar dan Yordania bukan demi perundingan damai dan pencarian solusi diplomatik, melainkan merupakan kamp-kamp untuk pembantaian rakyat Suriah.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> Security Council United Nations. (2015, February 12). Unanimously Adopting Resolution 2199 (2015), Security Council Condemns Trade with Al-Qaida Associated Groups, Threatens Further Targeted Sanctions. Retrieved from Security Council United Nations Press:

<https://www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm>

<sup>194</sup> Muhammad. (2015, February 14). Irak dan Suriah Sambut Gembira Resolusi DK PBB Anti-ISIS. Retrieved from: <http://liputanislam.com/internasional/timur-tengah/irak-dan-suriah-sambut-gembira-resolusi-dk-pbb-anti-isis/>

Resolusi 2199 yang disebutkan sebelumnya merupakan penerapan lanjutan daripada resolusi 2170 yang dihadirkan pada 15 Agustus 2014. Selain daripada pembekuan aset, embargo ekonomi dan persenjataan. Resolusi ini juga terfokus pada restriksi arus *foreign fighter* –pejuang ISIS yang berpergian dari negaranya dan bergabung dengan ISIS yang berada di Suriah dan Iraq– dengan memanggil negara anggota untuk melakukan tindakan nasional untuk menghindari foreign fighter tersebut dari negara mereka untuk gabung dalam kelompok tersebut, menghindari pergerakan dan juga suplai persenjataan serta pendanaan mereka di negaranya masing masing. Selain itu terdapat pengarah tim monitoring untuk melaporkan keberlanjutan ancaman ISIS dan al Nusra. dan juga melaporkan sumber persenjataan, keuangan, rekrutmen, dan demografis mereka dalam 90 hari –sehingga ditetapkan sanksinya di resolusi 2199 yang dimunculkan lebih dari 90 hari setelah resolusi ini hadir.<sup>195</sup>

Disisi lain Inti dari Resolusi 2249 ialah untuk mendesak semua anggota PBB dalam menempuh semua langkah yang diperlukan untuk perlawanan terhadap ISIS. Dalam dokumen resolusi yang disusun di Prancis tersebut. Semua negara anggota PBB sebaiknya “menggandakan dan mengoordinasikan semua upaya mereka untuk mencegah dan menekan serangan teroris.” Diserukan juga kepada semua negara untuk “membasmi tempat perlindungan’ ISIS dan berbagai kelompok milisi lainnya yang beroperasi di sejumlah bagian Irak dan Suriah.” Akan tetapi, resolusi tersebut tidak menyebutkan Bab VII Piagam PBB yang memungkinkan digunakannya kekuatan militer. Padahal, Prancis dan Rusia berpendapat bahwa aksi militer sudah bisa dibenarkan karena negara-negara berhak melindungi diri dari serangan mereka.<sup>196</sup>

---

<sup>195</sup> Op cit

<sup>196</sup> BBC. (2015, November 21). Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Lawan ISIS. Retrieved from BBC News Indonesia:

Resolusi ini dikeluarkan pada tanggal 20 November 2015 yang disebabkan karena tantangan besar pada skala global yang dimana ISIS sebagai ancaman global atas keamanan dan kedamaian internasional. Yaitu tepatnya setelah jaringan teroris ini melakukan serangan beruntun ke Sousse, Ankara, Sinai, Beirut dan terakhir di Paris dari periode akhir Juni sampai pertengahan November 2015. Meskipun Al-Nusrah serta kelompok atau individual lain yang terasosiasi dengan Al-Qaeda juga dipertimbangkan sebagai ancaman kedamaian dan keamanan Internasional, tetapi dapat kita lihat bahwa Resolusi 2249 DK PBB dengan jelas menunjuk ISIS sebagai tantangan utama. Menjadi sebuah ancaman global dan inpreseden pada kedamaian dan keamanan internasional membuat ISIS sebagai perhatian primer.<sup>197</sup>

Resolusi 2249 secara implisit menurut Dapo Akande dan Marko Milanovic dapat dijadikan sebagai basis legal yang tidak mengikat –karena tidak menggunakan kata *authorize* ataupun *decide* melainkan menggunakan kata *calls upon* dalam resolusi tersebut–, sehingga hal tersebutlah yang membuat resolusi ini terlihat ambigu serta menjadi pro kontra di kalangan masyarakat– untuk suatu negara yang mampu dalam menggunakan kekuatannya melawan ISIS/Daesh di wilayah yang berada dibawah kendali mereka yaitu di Suriah dan Irak, membuat negara negara yang memiliki kapasitas militer yang kuat termasuk yang ikut dalam *Global Coalition*

---

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121\\_dunia\\_pbb\\_isis\\_resolusi](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_isis_resolusi)

<sup>197</sup> Hilpold, P. (2016). The fight against terrorism and SC Resolution 2249 (2015): towards a more Hobbesian or a more Kantian International Society? *Indian Journal of International Law* (2015) 55(4):535–555, 535-555.

*Against ISIS* –atau sering disebut *US-led Coalition*– yang dipimpin oleh AS.<sup>198</sup>

Hal ini Seperti yang dilakukan oleh Britania Raya dengan kesepakatan parlemen dan Perdana Menteri David Cameron memutuskan untuk bergabung dengan *Coalition Airstrike Against Isis* –yang masih dibawah oleh *Global Coalition Against ISIS*– dalam menggunakan serangan udara ke Suriah dan Irak setelah melalui perdebatan panjang selama sepuluh jam. Dan dalam laporannya, Pemerintah Britania Raya akan menjadikan resolusi 2249 sebagai basis legal untuk self-defense pada negaranya dari ancaman sel tidur ISIS yang menjamur di Eropa, dan kemungkinan besar ada banyak di Britania Raya.<sup>199</sup> Begitu juga dengan Jerman –dengan tujuan yang sama– yang dimana Kabinet dengan *German Bundestag* –sebutan untuk parlemen federal di Jerman– telah sepakat untuk ambil bagian dalam intervensi militer di Suriah dengan bergabung bersama *Global Coalition Fighting IS*.<sup>200</sup>

Walaupun begitu legalitas invasi US-Led Coalition dalam menggunakan resolusi ini memang masih menjadi perdebatan dan pertentangan. Salah satu yang menentang argumen diatas ialah Nicholas Boeglin. Sebagai seorang pakar hukum internasional dia menyatakan bahwa alasan invasi US-Led coalition yaitu sebagai self-defense tidak sesuai dengan Piagam PBB 7 pasal 51 yang dimana yang dimaksud self

---

<sup>198</sup> Dapo Akande, M. M. (2015, November 21). The Constructive Ambiguity of the Security Council's ISIS Resolution. Retrieved from ejiltalk.org: <https://www.ejiltalk.org/the-constructive-ambiguity-of-the-security-councils-isis-resolution/>

<sup>199</sup> Lang, A. (2015,December 1). Briefing Paper; Legal Basis for UK Military Action in Syria. Retrieved from Parliament.UK

<sup>200</sup> Zuvela, M. (2015, December 2). Bundestag debates Bundeswehr mission in Syria. Retrieved from DW.Com: <https://www.dw.com/en/bundestag-debates-bundeswehr-mission-in-syria/a-18888053>



defense disini ialah respon militer yang legal terhadap kekerasan militer di negara lain. Dinyatakan juga bahwa kutipan pasal ke 5 dalam resolusi tersebut yaitu *calls upon Member States with the requisite capacity to take "all necessary measures" to prevent and suppress its terrorist acts on territory under its control in Syria and Iraq*" bukan sebagai landasan untuk melakukan tindakan militer di Suriah dan Iraq. Ditambahkan oleh artikel *Le Monde* yang menyatakan bahwa resolusi 2249 tidak mengizinkan otorisasi legal untuk bertindak melalui kekuatan militer di Suriah dan Iraq karena tidak sesuai dengan piagam PBB Bab VII<sup>201</sup>.

## 2. Invitasi permintaan pertolongan dari Pemerintah Iraq dan Suriah

Legal Basis daripada invitasi dikatakan oleh beberapa ahli hukum internasional bahwa jika perizinan valid diberikan oleh representatif dan pemerintah yang masih efektif/absah suatu negara, maka intervensi yang berasal dari invitasi akan selalu legal dan tidak ada pelarangan melakukan intervensi yang diminta dalam perang sipil. Namun dalam pandangan lain, intervensi external oleh invitasi itu biasanya tidak sah ketika obejktifnya untuk menempatkan sebuah perselisihan politik internal secara eksklusif yang berpihak kepada pemerintah yang telah terbentuk. Namun meskipun demikian dalam kasus dukungan militer dapat legal sepenuhnya ketika maksud intervensi tersebut untuk mencapai objektif lain, termasuk bertempur bersama-sama melawan terorisme. Satu hal yang jelas dapat menjadi hambatan atas dapat diterimanya intervensi berdasarkan invitasi ialah yang berkaitan dengan

---

<sup>201</sup> Boeglin, N. (2015, December 09). Arguments based on UN resolution 2249 in Prime Minister's report on airstrikes in Syria: some clarifications needed. Retrieved from dipublico.org: <https://www.dipublico.org/103234/arguments-based-on-un-resolution-2249-in-prime-ministers-report-on-airstrikes-in-syria-some-clarifications-needed/>

asas *self-determination* –hak masyarakat suatu negara untuk menentukan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan eksternal– sehinga dalam artian tersebut ialah bahwa tidak boleh adanya dekolonisasi atau okupasi militer yang tidak berdasarkan hukum. Dengan kata lain jika permintaan intervensi dari pemerintahan suatu negara tidak melukai prinsip *self determination* –yang dalam kaitan ini ialah untuk melawan terorisme– maka intervensi seperti itu umumnya legal.<sup>202</sup>

Merujuk pada artikel yang ditulis oleh Karine Bannelier Christakis dalam kasus legal basis intervensi aktor ekstenal di Iraq, setiap tindakan intervensi tersebut tidak mengangkat permasalahan legalitas. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pada tahun 2014 –tahun dimana ISIS merebut beberapa area penting di Iraq, termasuk Mosul–, Pemerintah Iraq mengeluarkan beberapa permintaan bantuan dari komunitas internasional untuk membantu menundukkan ISIS dan melindungi teritorinya dan masyarakat Iraq dari tumbuhnya ancaman dari organisasi teroris internasional.<sup>203</sup>

Iraq secara jelas telah menegaskan beberapa kali bahwa serangan udara oleh koalisi tersebut telah mendapatkan ‘express consent’ -pernyataan perizinan- dari pemerintah Iraq. Dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB pada September 2014, misalnya, Iraq menekankan hal ini:

*In accordance with international law and the relevant bilateral and multilateral agreements, and with due regard for complete national sovereignty and the Constitution, we have requested the United States of America to lead international*

---

<sup>202</sup> Karine Bannelier, C. (2017). Military Interventions against ISIL in Iraq, Syria and Libya, and the Legal Basis of Consent. *Leiden Journal of International Law*, 743-775.

<sup>203</sup> Ibid. Hal 750-751

*efforts to strike ISIL sites and military strongholds, with our express consent.*<sup>204</sup>

Sebagai penjas, surat undangan yang Iraq kirim kepada negara yang ikut campur dan Dewan Keamanan PBB secara jelas terfokus ditujukan secara umum untuk melawan terorisme. Dalam suratnya pada 25 Juni 2014, perwakilan Iraq menekankan bahwa terdapat empat alasan yang secara kumulatif menjustifikasi intervensi eksternal: Pertama, pemerintahan baru Iraq merupakan pemerintahan yang sah yang ditunjuk setelah pemilihan umum dibawah bantuan PBB; Kedua, ISIL merupakan sebuah entitas yang termasuk kedalam daftar organisasi teroris; Ketiga, Iraq adalah korban daripada serangan teroris oleh ISIL dan menghadapi ancaman serius dari organisasi teroris internasional; Dan keempat, Iraq meminta bantuan komunitas internasional. Diwaktu yang sama Iraq meminta negara asing untuk ikut campur dalam perang sipil, undangan tersebut untuk membantu pemerintah bertempur melawan ISIL.

Dan justru Tidak ada negara yang menentang validitas permintaan ataupun legal basis intervensi dari undangan ini. Sebaliknya, permintaan ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan legal justifikasi tidak hanya untuk intervensi di Iraq, tetapi juga untuk intervensi melawan ancaman serius pada keberlanjutan serangan ISIS ke Suriah. Seajar dengan serangan udara dari US-Led Coalition di Iraq, pemerintah Iraq juga mengotorisasi beberapa negara lain untuk turut campur tangan di teritorinya dan sekali lagi, meskipun dalam objeksi politik, legal basis intervensi oleh undangan ini tidak ditentang oleh setiap negara.

---

<sup>204</sup> UN Doc. S/2014/691. (2014, September 22). Letter dated 20 September 2014 from the Permanent Representative of Iraq to the United Nations addressed to President of the UNSC. Retrieved from UN Docs.org: <http://undocs.org/S/2014/691>

Ketika intervensi Iran di Iraq memimpin reaksi politik dari ketakutan beberapa negara pada aspirasi regional Iran, tidak ada negara yang mengangkat setiap objeksi tentang legalitas intervensi Iran. Justifikasi dari Iraq ke Iran atas basis perizinan yang valid dalam pertempuran melawan terorisme – kedua negara bahkan telah menandatangani pakta militer untuk melawan ISIL pada 31 Desember 2014–.<sup>205</sup>

Walaupun ditentang oleh Amerika Serikat dikarenakan akan menghalangi operasinya di Iraq.<sup>206</sup> Tetapi secara gamblang Iraq dalam hal ini membuka otorisasi kepada Rusia untuk ikut campur melawan ISIL di teritorinya pada akhir Oktober 2015, dikarenakan bagi pemerintah Iraq serangan udara US-Led Coalition terkesan lambat dan tidak efektif. Walaupun begitu kenyataannya Russia dalam melakukan operasi militer untuk melawan terorisme lebih terfokus di Suriah saja. Intervensi Rusia di Iraq seperti yang disebutkan sebelumnya ialah membangun *joint information centre* di Baghdad dengan tujuan untuk menganalisa pergerakan ISIS.<sup>207</sup>

Dari hal ini terlihat terlihat bahwa ‘Preseden Iraq’ jauh dari tentangan yang didasarkan pada pendekatan intervensi oleh invitasi. Terlihat seperti apa yang terjadi di Mali yaitu ketika Pranci melakukan Intervensi dengan undangan dari Pemerintah Mali tanpa adanya otorisasi Dewan Keamanan PBB, tetapi dengan restu dan keringanan darinya. Maka, dengan cara yang sama pada kasus Mali, apa yang

---

<sup>205</sup> Op Cit. Karine Bannelier. Hal 751

<sup>206</sup> CBS News. (2015, October 21). U.S. to Iraq: If Russia helps you fight ISIS, we can't. Retrieved from CBSnews.com: <https://www.cbsnews.com/news/us-iraq-chose-between-american-and-russian-airstrikes-in-isis-fight/>

<sup>207</sup> Middle East Eye. (2015, October 24). Iraq authorises Russia to strike Islamic State inside country. Retrieved from middleeasteye.net: <https://www.middleeasteye.net/news/iraq-authorises-russia-strike-islamic-state-inside-country-1869786714>

meligitimasi intervensi militer di Iraq itu tidak hanya validitas pada isu invitasi yang secara internasional diakui pemerintah, tetapi juga fakta bahwa objektifnya ialah hanya untuk melawan kelompok yang secara jelas tanpa keraguan ISIS yang diakui oleh Dewan Keamanan PBB sebagai 'kelompok teroris' berdasarkan hukum internasional.<sup>208</sup>

Kasus Suriah sedikit berbeda dengan kasus Iraq, Pemerintah Suriah juga mengumumkan invitasi kepada negara lain dalam melawan ISIL terkhusus kepada Rusia dan Iran. Namun dalam permasalahan validitas invitasi tersebut M. Weller mengatakan bahwa legitimasi dan kerepresentatifan penulis invitasi yaitu Pemerintahan Bashar al-Assad meragukan. Karena banyak negara yang mempertimbangkan bahwa pemerintah Suriah tidak dapat secara penuh mengklaim sebagai representatif masyarakat Suriah, dan memandang oposisi sebagai representatif yang sebenarnya.<sup>209</sup>

Hal ini disanggah oleh Karine Bannelier dengan menyatakan bahwa argumen tersebut merupakan argumen yang tidak terlalu meyakinkan karena tanpa memasuki eksaminasi (pemeriksaan) terhadap legitimasi demokratis pada Bashar al-Assad. Pada dasarnya pemerintahan al-Assad telah terpilih kembali di bulan Juni 2014 walaupun sedang dalam keadaan perang sipil. Beberapa negara, memang tidak mengakui pemerintah Suriah sebagai representatif yang sah dan sebaliknya mereka justru mengakui *Syrian Nasional Coalition* –yang dimaksud oposisi di paragraf sebelumnya–. Namun rezim yang tidak sah akan tetap menjadi pemerintahan

---

<sup>208</sup> Karine Bannelier, C. (2017). Military Interventions against ISIL in Iraq, Syria and Libya, and the Legal Basis of Consent. *Leiden Journal of International Law*, p 756

<sup>209</sup> Nick Robins, E. (2015, January 10). Russia Says Its Airstrikes In Syria Are Perfectly Legal. Are They? Retrieved from Huffington Post: [https://www.huffingtonpost.com/entry/russia-airstrikes-syria-international-law\\_us\\_560d6448e4b0dd85030b0c08](https://www.huffingtonpost.com/entry/russia-airstrikes-syria-international-law_us_560d6448e4b0dd85030b0c08)

di mata hukum internasional.<sup>210</sup> Terlebih lagi dalam artikel yang ditulis oleh Stefan Talmon, dia menegaskan dalam abstrak artikelnya tersebut bahwa terdapat perbedaan antara keputusan legal dan keputusan politis dan menemukan bahwa rekognisi *Syrian National Coalition* sebagai representatif yang sah dan menolak representatif Bashar al-Assad murni merupakan keputusan politis.<sup>211</sup>

Selain itu ditambah kekurangan *Syrian National Coalition* yaitu kurangnya kohesi dan kesatuan dan karakternya yang tidak stabil. Itulah yang membuat mayoritas komunitas internasional lebih menyukai mempertahankan rezim al-Assad di mata hukum internasional walaupun pemerintahan tersebut legitimasinya diragukan oleh beberapa negara. Karine Bannelier lebih lanjut lagi menjadikan Preseden Mali yang sebagai contoh yang menunjukkan kurangnya keefektifan pada otoritas Mali atas lebih dari setengah negaranya. Atau tentu saja tantangan politik menghadapi otoritas ini, tanpa mempertanyakan validitas pada undangan yang ditunjukkan kepada Prancis pada Januari 2013 untuk ikut campur dalam melawan teroris yang mengancam akan merebut ibukota Bamako. Dalam tataran organisasi internasional, walaupun Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam telah menanggukhan keanggotaan Suriah, pemerintahan tersebut tetap hadir di organisasi lainnya. Ditunjukkan dengan aktifnya Permanent Mission of the Syrian Arab Republic dari PBB, pengiriman surat kepada Sekertaris Jendral dan Presiden Dewan Keamanan PBB, dan hadirnya Pemerintahan Suriah dalam meratifikasi dan ikut serta dalam pengadopsian resolusi 2118 DK PBB pada September 2013. Hal-hal tersebut telah

---

<sup>210</sup> Op Cit. Hal 761

<sup>211</sup> Talmon, S. (2013). Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a People. *Chinese Journal of International Law* , 219-253.

menunjukkan bahwa rezim ini masih dapat mewakili pemerintah Suriah.<sup>212</sup>

Dalam hal ini Rusia juga tidak merahasiakan intervensi militernya terhadap ISIS di Suriah dari awal dan secara jelas menggunakan argumen invitasi dari pemerintahan Suriah yang sah sebagai legal justifikasi. Intervensi militer Rusia di Suriah dimulai pada 30 september 2015 dengan serangan udara yang masif ketika pasukan dukungan disembarkan di beberapa Area seperti Markas Al Tartus atau Bandara Latakia<sup>213</sup>. Dalam pesannya kepada Dewan Keamanan PBB pada 15 oktober 2016, Russia menjelaskan

*In response to a request from the President of the Syrian Arab Republic, Basharal-Assad, to provide military assistance in combating the terrorist group Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) and other terrorist groups operating in Syria, the Russian Federation Began launching air and missile strikes against the assets of terrorist formations in the territory of the Syrian Arab Republic on 30 September 2015.*<sup>214</sup>

Di sisi lain, Suriah juga menyambut serangan tersebut. Menghadirkan intervensi Suriah sebagai legalitas yang sempurna dan mengajak negara lain untuk “menghormati hukum internasional” di bersamaan dengan Rusia dan Suriah, dan tindakan dalam kooperasi dengan pasukan pemerintah. Sejak itu pemerintah Suriah Bashar al-Assad tidak pernah berhenti untuk mengutarakan persetujuan dan dukungan pada intervensi militer Russia dan Iran, dan tentu saja kedua negara ini dalam menggunakan intervensi militernya menggunakan

---

<sup>212</sup> Op Cit. Karine Bannelier. Hal 762

<sup>213</sup> Ibid. Hal 760

<sup>214</sup> UN Doc. S/2015/792, 15 October 2015, Letter dated 15 October 2015 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the President of the Security Council.

legal basis dari invitasi yang diberikan oleh pemerintah Suriah.<sup>215</sup>

Berlawanan dengan sisi koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang tidak bisa menggunakan legal basis tersebut dalam intervensinya di Suriah, dan justru mereka hanya bisa mengandalkan *passive consent* –atau juga bisa disebut *acquiescence* yaitu ketika perizinan itu didapatkan dengan terpaksa oleh yang memberikan izin– yang sangat kontroversial dalam hukum internasional. Hal itu dikarenakan;

Pertama, dengan jelas bahwa Suriah tidak akan meminta intervensi yang dapat mengganggu kedaulatannya yang kontras dengan yang ditujuak kepada Iran dan Rusia. Dalam pesan kepada Dewan Keamanan PBB pada 17 September 2015, Suriah menegaskan bahwa dirinya ‘has not made any request to that effect’ (tidak membuat permintaan yang berakibat seperti itu)

Kedua, perizinan tidak akan pernah diminta dari Suriah oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, karena setiap dari mereka bermusuhan dengan pemerintah Resmi Bashar al-Assad. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat secara jelas menyatakan bahwa koalisinya tidak mencari persetujuan dari rezim Suriah’, dan secara konstan mematahkan setiap kooperasi dengan pemerintah Suriah.

Ketiga, dalam wilayah legalitas, isu invitasi atau persetujuan belum pernah disebutkan dalam legal justifikasi yang disediakan oleh negara-negara yang melakukan intervensi. Pesan AS pada September 2014 dan seluruh pesan lain dari negara yang mengintervensi yang ditujukan untuk Dewan Keamanan PBB hanya pendekatan sebagai sebuah legal basis, ‘self-defence’, pada individual dan/atau kolektif, dikombinasikan dengan pertarungannya melawan terorisme. Jauh dari persetujuan Suriah, Suriah mengenalkan pesan-pesan

---

<sup>215</sup> Ibid. Hal 761



tersebut sebagai ketidakmampuan ataupun ketidakmauan untuk mencegah ancaman tersebut keluar dari teritorinya.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalam kasus aktivitas militer US-Led Coalition di Suriah, tidak ada yang mengeluarkan invitasi dan tidak ada yang meminta atau menerimanya. Dapat dipertimbangkan, meskipun demikian, identitas musuh bersama dan kepentingan bersama paling tidak dapat meninggalkan terbukanya kemungkinan semacam kooperasi yang disembunyikan maupun paling tidak adanya *passive consent* –persetujuan pasif– dan kerelaan dari pemerintah Suriah untuk serangannya melawan ISIS. yang dimana bagaimanapun, pada 24 September 2014, satu hari setelah serangan pertama di Suriah, Menteri Rekonsiliasi Nasional Suriah menyatakan bahwa serangan udara yang ditembakkan oleh koalisi internasional tersebut dalam melawan ISIL di Suriah berada di arah yang benar<sup>216</sup>. Sehingga bukan tidak mungkin jika koalisi tersebut menggunakan resolusi Dewan Keamanan PBB 2249 yang disebutkan sebelumnya.

Atau dalam kaitan lain, secara konsekuen, bahwa tindakan koalisi internasional tersebut dapat menjustifikasi penggunaan Pasal 51 Piagam PBB yaitu sebagai self-defense secara individual dan kolektif. Dan self defense tersebut dapat diperbolehkan karena pemerintah Suriah tidak mampu menangani serangan ISIS di teritorinya. Dan menghindari ISIS untuk menyerang negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris Prancis, dll.<sup>217</sup>

---

<sup>216</sup> Ibid Hal 766-770

<sup>217</sup> Ildelfonso Ocampos, T. (2016, August 8). The legal basis for foreign military intervention in Syria. Retrieved from middleeasteye.net: <https://www.middleeasteye.net/columns/legal-basis-foreign-military-intervention-syrian-territory-805524848>